

ORIENTASI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI) JAWA TIMUR DALAM MELAKUKAN LITERASI POLITIK GUNA MENDORONG PENGUATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Anggi Novita

15040254018 (PPKn, FISH, UNESA) anggimovita@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari.S.Sos.,M.IP

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan arah atau kecenderungan tindakan yang membuat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur melakukan literasi politik sebagai upaya penguatan perempuan dalam bidang politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kritis. Penelitian didukung oleh empat orang informan yang berhubungan dengan organisasi KPI, yakni ketua umum (presidium), satu orang anggota pelaksana dan dua orang narasumber kegiatan literasi politik dipilih berdasarkan teknik pemilihan kriteria (*purposive sampling*). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori tindakan komunikatif milik Jurgen Habermass. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik adalah berorientasi partisipatif, demokratis dan gender egalitarian. Kecenderungan tersebut dapat dikaji berdasarkan visi dan misi organisasi, penyelenggaraan program pendidikan politik yang cenderung mendidik dan mengawal, melalui kegiatan pendidikan pemantau, pendidikan pemilih maupun kursus caleg dan kegiatan kelas politik yang berkoordinasi dengan pemerintah. Artinya, perempuan bukan hanya diberi pengetahuan tetapi juga harus terlibat aktif dalam sistem perpolitikan yang selama ini cenderung mendepolitisasi kepentingan perempuan.

Kata Kunci: Orientasi, Literasi, Perempuan, Pendidikan

Abstract

The purpose of this research is to describe sense or orientation of Non Government Organization namely Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) region East Java to organize woman political literacy program. This Research uses a qualitative approach with a critical design method. The data supporting from primary and secondary data, primary data take from four infoman who understand about KPI organisation based with purposive sampling technique. Secondary data take by some module about political education. The result of the reserach show that Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) region East Java dong political literacy for woman have some orientation such as, participatory orientation, demoratic orientation and gender egaliter orientation. Tedency about this orientation seen from vision and mission organisation of KPI, procession of political education program such as, vooter educational and monitring educational for woman, course for woman legislative and political educational class with government cooperating. For this program eliminate woman depolititation cause woman taught for know and active on the political system

Keywords: Orientation, Literacy, Woman, Education

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam kegiatan praktis sistem politiknya, berusaha senantiasa mewujudkan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dengan setara, bebas dan adil. Secara normatif prinsip tersebut ideal dan sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjalankan negara yang juga tercermin dalam UUD

tahun 1945 dan Pancasila. Kedaulatan ditangan rakyat dengan prinsip kesetaraan, bebas dan adil menjadikan rakyat dalam suatu negara tersebut dijamin untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan negara baik sebagai aktor politik maupun pemilih tanpa perbedaan status sosial, gender maupun SARA. Fakta yang sering terjadi mewarnai sistem politik Indonesia adalah akses politik berdasarkan gender lebih banyak diperankan oleh politisi laki-laki. Faktor utama penyebab sistem ini

telah lama menjadi akar adalah kultur masyarakat yang merekonstruksi peran antara laki-laki dan perempuan. Secara tidak langsung terjadi spesialisasi ruang peran laki-laki adalah publik dan perempuan adalah domestik. Label ini juga sampai terbawa pada bidang politik. Masyarakat mempercayai bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai fungsi untuk mengambil keputusan, dari kebiasaan yang ada pada unit mikro itu kemudian dibawa kelingkup makro. Arena politik dikonsepsikan lebih cocok untuk laki-laki yang pemikirannya cenderung rasional dan perempuan hanya sebagai objek yang seakan-akan sudah pasti dilindungi oleh kebijakan politis tanpa harus berkotor tangan disektor politik untuk mengolah kebijakan.

Rezim Orde Baru telah berhasil melanggengkan kultur tersebut menjadi struktur yang sah pada masanya. Kampanye terstruktur agar perempuan tidak memasuki arena politik dengan dalih mencitrakan perempuan yang baik adalah yang tidak masuk ranah politik dan kebutuhannya pasti sudah dikalkulasikan oleh bapak negara (suami atau ayah). Gerakan perempuan pada masa tersebut pasif. Pasca Reformasi kajian tentang perpolitikan yang demokratis dan berkesetaraan gender mendapatkan perhatian dan ruang khusus bagi perempuan. Kebijakan *Affirmatife action* atau pemberlakuan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai, pencalonan legislatif perempuan semua tingkatan diagendakan dan terverifikasi menjadi sebuah regulasi yang sampai saat ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum legislatif semua tingkat harus mendaftarkan bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan tersebut menjadi pijakan setiap tahun pemilu terhitung dari tahun 2004-2014 dalam tabel 1 menggambarkan presentase caleg perempuan pada pemilu oleh beberapa partai peserta sebagai berikut.

Tabel 1 Presentase Caleg Perempuan Pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014 Berdasarkan Asal Partai

No	Partai Politik	2004		2009		2014	
		Jumlah Caleg	Presentase	Jumlah Caleg	Presentase	Jumlah Caleg	Presentase
1.	PKB	207	37,6	134	33,67	210	37,63
2.	PKS	219	38,00	212	36,61	191	38,82
3.	PDIP	113	28,03	222	35,41	200	35,71
4.	Golkar	116	28,03	194	30,27	202	36,07
5.	Demokrat	129	27,00	221	32,94	205	36,96
6.	PAN	200	35,00	177	29,70	207	36,96
7.	PPP	98	22,3	127	26,91	214	39,05

Sumber : KPU-RI

Berdasarkan tabel 1, menggambarkan bahwa dalam pemilu tahun 2004 terdapat partai yang belum memenuhi kuota 30% yakni, PDIP dan Golkar dengan presentase (28,03%), Demokrat (27%) dan yang terendah PPP (22,03%). Pemilu tahun 2009 menunjukkan masih ada partai dengan calon perempuan masih di bawah 30% seperti PPP (26,91%), PAN (29,70%). Pada pemilu tahun 2014 semua partai berhasil mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon, dengan persentase pencalonan perempuan terendah adalah Golkar (36,07%). Sementara itu, partai PPP bahkan berhasil mencalonkan perempuan sampai (39,05 %). Melihat tabel tersebut mengimplikasikan bahwa partai sejatinya telah menuruti kebijakan administratif kuota 30%, namun jika dibandingkan dengan jumlah komposisi keterpilihan perempuan masih rendah, seperti pada diagram 1 berikut ini.

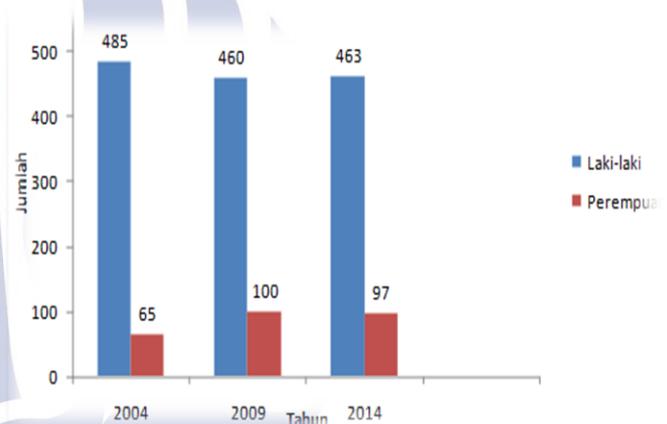


Diagram 1 Perbandingan Jumlah Keterpilihan anggota Legislatif Perempuan dan Laki-laki di DPR-RI dari Hasil Pemilu 1999-2014 (Sumber Data : Badan Pusat statistik)

Berdasarkan diagram 1, menunjukkan hasil keterpilihan DPR-RI berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun pertama sejak afirmasi bergulir perempuan terpilih sebanyak 65 dari 485 laki-laki, tahun berikutnya meningkat menjadi 100 orang dari 460 laki-laki dan tahun 2011 turun menjadi 97 orang. Kesimpulan yang didapat bahwa, rata-rata keterpilihan 17%. Kuota 30% perempuan mengisyaratkan bahwa semangat perempuan untuk menjadi wakil rakyat terus meningkat, namun jumlahnya sangat timpang. Partai dalam hal ini mempersiapkan 30% calon adalah sebagai strategi lolos administratif, padahal tahun 2014 rata-rata partai memasok lebih dari 30% .

Komitmen negara untuk memberantas ketimpangan gender dalam ruang politik untuk menjamin demokrasi telah berjalan, namun fakta yang terjadi bahwa regulasi tersebut masih lemah untuk membawa perempuan mewakili rakyat. Kebijakan afirmasi lebih cenderung sebagai indikator kelolosan partai dalam administrasi, namun partai tidak secara serius memberikan

pendidikan politik kepada perempuan potensial untuk mewakili rakyat. Fenomena asal pasang calon perempuan terjadi manakala akan diadakan pemilihan umum. Intrik supaya terlihat demokratis dan telah mengkader perempuan adalah dengan memasukkan calon perempuan yang memiliki basis sosial dan ekonomi yang memadai seperti golongan artis, atau elit keluarga organisasi keagamaan yang bisa mendulang masa lebih banyak. Partai tidak perlu berusaha keras sebagai instrumen kader perempuan (Puskapol Fisip UI, 2014:208).

Sepintas tidak ada yang salah dengan demokrasi, karena partai telah memenuhi amanat undang-undang afimasi. Namun jika dikaji lebih kritis, mengapa perempuan mau dijadikan sebagai alat politik dan tidak cenderung menjadi wakil politik yang bersaing secara sehat dan prosedural. Padahal penting bagi perempuan untuk membawa visi-misi kebutuhan dalam sistem perwakilan. Banyak kebutuhan perempuan dan anak yang belum mampu diakomodir politisi laki-laki seperti KB, kesejahteraan keluarga, kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan anak. Menurut (purwanti, 2015:196) penyebab perempuan mau menjadi alat politik tersebut adalah karena masalah identitas perempuan sendiri dalam konteks kemasyarakatan, sosial dan ekonomi.

Pendapat ini memaknai bahwa perempuan yang menjadi alat politik kurang memiliki sumber-sumber kekuasaan. Mengapa jika perempuan sadar tidak memiliki sumber-sumber kekuasaan yang cukup bersedia menjadi calon legislatif, maka jawabannya adalah kurangnya literasi politik perempuan. Literasi yang menggambarkan kondisi pemahaman dan keterlibatan. Perempuan yang direkrut tidak mengerti pengkaderan, calon perempuan hanya membawa sebatas keyakinan mampu karena memiliki status sosial tanpa memikirkan basis sosial dan ekonomi. Ketika disandingkan dengan calon yang lain bahkan perempuan tersebut tidak paham sistem *Zypper* atau penomoran peserta pemilu. Perempuan sering mendapat nomor yang kurang strategis. Perempuan yang mendapat posisi nomor 1, 2 dan 3 adalah perempuan-perempuan yang menurut partai telah tergambar kemenangannya (Mulia dkk, 2005:121).

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa literasi politik perempuan masih rendah dalam pengetahuan dan pengalamannya tentang organisasi. Idealnya yang diharapkan perempuan sebagai mayoritas penduduk di Indonesia, perempuan yang maju dalam parlemen harus tahu, mau, dan mampu untuk menjadi wakil rakyat. Partai harus memberikan pendidikan politik yang cukup bagi perempuan terutama tentang masalah kebutuhan perempuan dalam segala bidang

dengan persepektif politik gender. Harapan perempuan bukan sekedar memenuhi kuota 30% menduduki kursi parlemen. Perempuan harus memiliki kapasitas, kualitas, serta membawa visi-misi perempuan dan seluruh rakyat dengan sifat keibuannya yang cermat. Percuma apabila perempuan masuk dalam politik tetapi tidak mengerti visi-misi yang harus dibawa untuk menyejahterakan perempuan sebagai kaum marjinal korban kebijakan, dan korupsi. Literasi politik yang relevan dan berkesinambungan harus dipenuhi untuk memastikan perempuan yang masuk legislatif berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada demokrasi dan gender. Pemerintah yang berupaya untuk menghadirkan regulasi lebih baik didukung dengan literasi politik yang memadai, memang hasilnya akan fluktuatif dan evolusioner namun paling tidak usaha tersebut dimasa yang akan datang benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap nasib perempuan dan menyelamatkan demokrasi dari alibi perempuan sebagai alat partai.

Faktor selain calon legislatif perempuan yang kurang literasi politik dan cenderung menjadi alat partai. Fakta selanjutnya menggambarkan bahwa pemilih perempuan juga memiliki masalah literasi politik yang rendah. Indikator ini terindikasi dari referensi perempuan dalam memilih atau kemandiriannya dalam memilih pemimpin, rentannya perempuan pemilih sebagai korban yang menjadi alat kecurangan, seperti perempuan cenderung terpapar *money politic*, praktik pencoblosan lebih dari satu tempat pemungutan suara. Ibu rumah tangga juga rentan menjadi masa penarik suara seperti pada kampanye-kampanye, seharusnya mereka juga mengerti apa yang mereka butuhkan dalam kampanye (Ridwan, 2004:207). Mengingat bahwa, komposisi jumlah penduduk Indonesia lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Apabila pemilih perempuan sendiri tidak sadar akan pentingnya menjadi pemilih bertanggung jawab dan berorientasi terhadap kesejahteraan perempuan dan anak maka, akan merugikan demokrasi dan yang paling serius adalah merugikan kelompok perempuan sendiri. Membebaskan perempuan dari terbelenggunya pengetahuan dan kemampuan politik adalah langkah yang tepat.

Secara regional permasalahan keterwakilan dan pemilih perempuan yang kurang mendapat penguatan karena terbelenggunya pengetahuan dan kemampuan politik akibat kultur maupun struktur, juga dirasakan oleh provinsi Jawa Timur. Beruntung saat ini terdapat representasi pemimpin Jawa Timur perempuan yang kebijakannya sangat berpengaruh untuk kesejahteraan, seperti Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Walikota Surabaya ibu

Tri Risma Harini. Kinerja pemimpin perempuan tersebut dapat menjadi patokan bahwa perempuan potensial yang melek politik dan gender akan membawa perubahan besar dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Maka dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain untuk tidak takut memilih perempuan atau sebaliknya perempuan yang potensial tidak takut untuk masuk ke dalam sistem politik. Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 Kota/Kabupaten juga terdampak politik perempuan yang cenderung *patron-klien*, bahkan terdapat kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali seperti Kabupaten Bangkalan. Anggota DPRD Jawa Timur komisi E menyatakan, “apabila terdapat daerah yang tidak memiliki keterwakilan perempuan, maka kebijakannya cenderung maskulin, kurang porsi untuk memperhatikan kebutuhan anak dan perempuan”. Bahkan Kota Pasuruan hanya memiliki dua orang wakil perempuan, Kabupaten Sampang satu orang wakil perempuan. Sementara rata-rata yang memenuhi keterwakilan dengan presentasi 14% pada pemilu 2014 hanya tiga kota yakni Kota Surabaya, Kota Kediri dan Kota Madiun (<http://surabaya.com/2012/12/15/legislator>).

Berdasarkan fakta tersebut menjadi motor penggerak bagi organisasi Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur untuk melakukan penguatan politik melalui pendidikan politik untuk perempuan. Sesuai dengan visi dan misi yang memastikan keterwakilan perempuan di semua bidang dan seluruh elemen kepentingan perempuan dan marjinal serta pemberdayaan hak-hak perempuan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Pemberlakuan program literasi politik adalah serangkaian program pendidikan politik yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan memerlukan jangka waktu yang tidak sedikit.

Konsistensi dan keseriusan harus dijalankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal demi penguatan perempuan dalam politik. Tujuan yang akan dicapai adalah penguatan perempuan dalam berpolitik. Penguatan ini diperuntukkan bagi perempuan yang akan menjadi wakil rakyat maupun perempuan pemilih, karena disinyalir memiliki kondisi melek politik yang rendah atau literasi politik yang rendah. Peningkatan kegiatan literasi politik melalui pendidikan menjadi perhatian KPI Jawa Timur. Literasi politik bagi perempuan berguna sebagai jembatan menuju penguatan perempuan dalam politik, menjamin demokratisasi, memutus depolitisasi perempuan, dan meningkatkan partisipasi politik perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan harus sadar bahwa mereka memiliki hak untuk memilih wilayah publik serta berperan sesuai potensinya.

Perempuan berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. Perempuan dengan kondisi literasi politik yang rendah harus diberi penguatan bahwa kehadiran kelompok perempuan sebagai wakil akan memberikan makna yang sangat berdampak pada keadilan politik bagi perempuan.

Program KPI Jawa Timur sebagai lembaga swadaya masyarakat berusaha menjawab tantangan literasi politik perempuan yang rendah. Literasi politik bermakna sebagai suatu kondisi kesadaran dan kekhawatiran akan praktik politik perempuan yang secara langsung menghambat kualitas, peran, keterwakilan, dan kemandirian perempuan berpolitik. Program penyadaran dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik dalam mencapai literasi politik yang diharapkan. Pandangan yang mendasari tindakan KPI Jawa Timur dalam melakukan pendidikan politik diharapkan memiliki orientasi baru yang relevan guna menguatkan peran wanita dalam politik praktis, baik yang menjadi wakil rakyat maupun pemilih (*voter*) yang berasal dari perempuan.

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari tindakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan penggalan nilai, ide, norma yang identifikasinya melalui proses kognisi dan pengalaman (Wirawan, 2014:78). Berdasarkan fenomena yang membelenggu perempuan dalam berpolitik praktis, kehadiran perempuan dalam kebijakan afirmatif hanya menjadi syarat kelolosan partai membuat esensi kuota afirmasi dan kualitas caleg perempuan kurang diperhatikan. Akibatnya, tingkat keterpilihan dan makna keterwakilan perempuan dalam parlemen tidak banyak mengakomodir kebijakan untuk perempuan.

Fenomena selanjutnya adalah kondisi *patron-klien* yang membelenggu caleg perempuan yang akan berkompetisi dalam pemilu, sehingga memicu sikap tidak mandiri dan pesimis bagi caleg perempuan yang tidak berasal dari elit tertentu terutama di Jawa Timur. Kondisi seperti ini juga diperparah oleh perilaku pemilih perempuan yang juga cenderung *paternalistik* dalam menentukan pilihan politik. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut perlu dilakukan penguatan perempuan dalam politik praktis bagi caleg perempuan dan pemilih perempuan melalui literasi politik.

Kehadiran KPI Jawa Timur yang turut melakukan literasi politik perempuan menjadi kajian menarik untuk melihat kecenderungan tindakan atau orientasi literasi politik untuk menguatkan perempuan dalam politik. Berdasarkan data dan fakta terkait, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menjawab bagaimana

orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik guna mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah atau kecenderungan KPI Jawa Timur melakukan literasi politik guna mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni, (1) Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan deskripsi orientasi literasi politik perempuan yang dilakukan oleh LSM /gerakan wanita. (2) Manfaat praktis bagi masyarakat, memotivasi khususnya kaum perempuan untuk dapat melaksanakan literasi politik secara maksimal demi menumbuhkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam politik.

Kajian yang relevan untuk mendefinisikan orientasi secara konseptual dalam menggambarkan penelitian yang hendak dicapai dengan mengambil pendapat ahli. Menurut Talcott Parson dalam Wirawan (2014:78), menganalisa orientasi atau dasar pandangan yang mempengaruhi tindakan berdasarkan teori struktural fungsional mengatakan bahwa, arah atau kecenderungan tindakan tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik. Artinya, individu menentukan arah dan tindakan yang dipilih berdasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Maka dapat didefinisikan bahwa, orientasi adalah arah atau pandangan yang mendasari tindakan manusia. Tindakan tersebut berdasarkan pada dorongan kemauan yang didapat berdasarkan ide, nilai, dan konstruksi pengalaman manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidup. Berdasarkan kajian dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan bahwa orientasi adalah kecenderungan akan suatu arah tertentu, atau keinginan kedepan yang hendak dicapai.

Orientasi sebagai peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar. Pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang dikehendaki. Orientasi menurut (Chazienul, 2016:40) juga dapat bermakna sebagai tindakan sesuai tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang, kelompok, serta kumpulan atau organisasi. Orientasi lebih luas dari sekedar tujuan dan juga bukan tujuan akhir, karena menyangkut keseluruhan tindakan, sikap, usaha, dan berhubungan erat dengan visi dan misi. Dalam penelitian ini, orientasi yang hendak dikaji adalah orientasi program suatu organisasi berbasis kemasyarakatan yang memiliki sebuah misi pemberdayaan politik dengan melaksanakan pendidikan politik perempuan, yakni organisasi KPI Jawa Timur. Organisasi tentu memiliki sebuah orientasi, sifat orientasi yang diambil oleh anggota dalam organisasi adalah orientasi kolektif. Alasan tersebut karena

organisasi merupakan tempat berkumpulnya individu-individu menjadi sebuah kelompok yang secara umum memiliki ikatan emosional dan motivasi bersama terhadap tujuan yang sama (Fredrickson, 1998:173-136), tidak terkecuali anggota-anggota dalam struktur kepengurusan KPI Jawa Timur yang satu tujuan peduli terhadap kondisi literasi politik perempuan. Sehingga keberadaan dan program organisasi tersebut dalam pemberdayaan politik penting untuk mengetahui orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik.

Pengertian orientasi dalam melakukan literasi politik, memiliki makna arah kecenderungan atau pandangan untuk melakukan suatu kegiatan edukatif melalui pendidikan politik karena suatu kondisi kesadaran dan partisipasi yang rendah dalam politik masyarakat. Dalam penelitian ini KPI Jawa Timur sebagai Organisasi Non Pemerintahan (*NGO*) mengambil bagian dalam melakukan literasi politik. Sehingga perlu untuk mengkaji arah, kecenderungan, atau pandangan kolektif yang mendasari organisasi KPI melakukan suatu kegiatan edukatif literasi politik melalui pendidikan politik perempuan guna mendorong penguatan perempuan dalam politik.

Kajian literasi politik dalam penelitian ini memuat tentang pemahaman kritis warga negara khususnya perempuan atas hal-hal pokok terkait dengan politik, menyangkut pemahaman mengenai politik itu sendiri, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian, dan alokasi yang merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Bakti dkk, 2012: 201). Rendahnya pemahaman kritis warga negara perempuan terhadap isu-isu politik kontemporer tidak jarang diikuti oleh menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi, seperti rentan dijadikan alat partai dalam menutupi citra keterwakilan perempuan. Literasi politik dapat menggambarkan suatu kondisi melek politik atau kesadaran terhadap politik yang rendah sehingga berimplikasi terhadap partisipasi yang rendah. Selain itu, literasi politik dalam penelitian ini juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan edukatif melalui pendidikan politik untuk menjangkau kondisi melek politik yang diharapkan. KPI Jawa Timur khususnya melakukan literasi politik melalui proses pendidikan politik yang pro terhadap konstituen perempuan, karena perempuan memiliki literasi politik yang masih rendah baik dalam keterlibatan partisipasi aktif (wakil rakyat) dan partisipasi pasif (pemilih perempuan).

Kajian pendidikan politik dalam (Crick, 2006:118) menggambarkan pendidikan politik sebagai sarana untuk membentuk literasi politik masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal dengan penekanan

pada penguasaan konsep, kemahiran berbahasa, dengan menguraikan masalah faktual yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Konsep politik di sini dimaknai konsep mengenai negara, masyarakat, dan hubungan diantara keduanya. Berdasarkan kajian dan definisi konsep orientasi, literasi politik dan pendidikan politik, maka dapat menggambarkan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengetahui arah atau kecenderungan KPI Jawa Timur melakukan kegiatan yang erat dengan kondisi melek politik bagi kelompok perempuan melalui kegiatan edukatif untuk mencapai tujuan menguatnya perempuan dalam politik.

Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermass. Teori Habermass mengungkapkan kebutuhan epistemologi dan etis bagi adanya suatu komitmen pada sebagian pemikir untuk secara kritis merefleksikan keyakinan-keyakinan pribadi dan sosialnya untuk mengadakan perubahan yang lebih emansipatoris melalui dialog pada ruang publik (Miller, 2002:66). Seluruh proyek Habermass mengarah pada pembebasan manusia atas segala bentuk penindasan, termasuk sekalipun penindasan itu dilakukan dalam dan atas nama "Rasioalitas Modern" (Endres, 1996:15).

Konsep teoritik Jurgen Habermass yang membangun penelitian ini terdapat empat dan konsep tersebut saling bertahapan yakni, (1) Komunikasi (2) Emansipasi (3) Refleksi diri (4) Tindakan Rasional. Komunikasi dalam hal ini sebagai dialog untuk membebaskan belenggu struktural dan kultural tentang label gender perempuan dalam politik, dimana pendidikan erat kaitannya dengan proses komunikasi untuk mentransfer pengetahuan (epistemologi). Emansipasi adalah pemberdayaan diri setelah melalui tahap dialog antarsubjek. Refleksi diri adalah sebuah kemampuan untuk mengingat pengalaman-pengalaman tentang perempuan dalam berpolitik, kemudian tercipta tindakan atau mendorong tindakan rasional dalam kegiatan politik. Pendidikan politik bagi perempuan akan melepas dari belenggu rasionalitas modern, seperti fenomena bahwa menjadi bagian partai namun hanya menjadi alat partai sebagai pemenuhan kuota. Apabila tidak mengkritisi fakta tersebut, maka fenomena tersebut tetap dianggap demokratis.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik guna mendorong penguatan perempuan dalam politik adalah penelitian Chandra Sithorus tentang pemberdayaan politik perempuan oleh KPI Semarang menyebutkan bahwa peran yang diambil adalah dengan mendampingi dan memotivasi perempuan untuk terlibat dalam politik secara mandiri. Dapat dimaknai bahwa kegiatan pendampingan itu sendiri adaah kegiatan yang sama

dengan proses mencapai literasi untuk kemandirian politik perempuan.

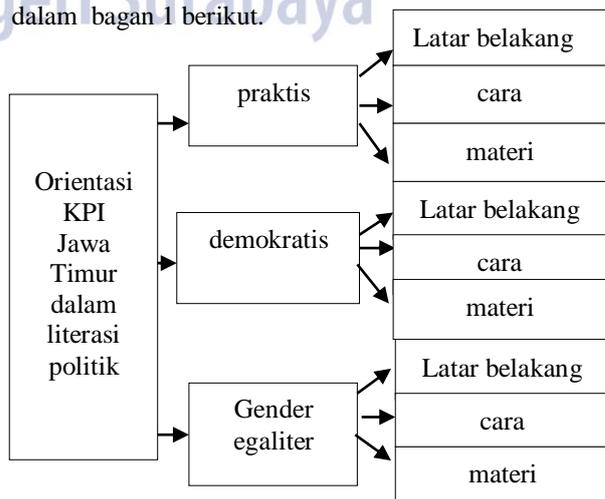
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritis untuk menjawab orientasi KPI Jawa Timur dalam melakukan literasi politik guna mendorong penguatan perempuan dalam politik. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung untuk melakukan serangkaian kegiatan pendidikan politik dan berpihak kepada organisasi KPI untuk turut membangun literasi politik perempuan melalui *Training of Tentor* (TOT) pembelajaran bagi pembelajar. Sehingga dapat menganalisa langsung bahwa fenomena tentang kondisi melek politik perempuan rendah menjadi indikator KPI Jawa Timur melakukan literasi politik yang berarah dan orientatif.

Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Informan terdiri dari penggiat literasi politik dari organisasi KPI Jawa Timur sebanyak empat orang, yakni satu orang presidium dan satu orang anggota serta dua orang narasumber pendidikan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari informan penelitian tentang bagaimana KPI Jawa Timur melakukan literasi politik guna mendorong penguatan perempuan dalam politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan deskripsi tentang orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik guna mendorong penguatan perempuan dalam politik. Orientasi dalam hal ini adalah arah atau kecenderungan KPI Jawa Timur melakukan literasi politik terhadap perempuan yang tujuannya adalah penguatan posisi perempuan dalam ruang politik. Dalam memudahkan menuliskan hasil, maka secara ringkas dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut.



Orientasi praktis terlibat langsung dalam sistem politik

Orientasi agar perempuan terlibat dalam politik praktis memiliki makna bahwa, perempuan harus menjadi aktor atau elit dalam sistem politik yang menduduki berbagai lini kekuasaan pemerintah. Melalui mekanisme pemilihan dan cara-cara yang demokratis sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Melaksanakan literasi politik, berarti perempuan akan mendapat pendidikan dan pengawalan untuk berpolitik praktis, agar jumlah perempuan yang terlibat dalam politik praktis dapat terdorong secara kuantitas dan kualitas. Perlu kegiatan penyadaran dan pendidikan politik baik terhadap perempuan yang berpotensi menjadi wakil maupun perempuan pemilih. Orientasi praktis ini dapat ditinjau dari latar belakang, cara yang ditempuh, dan materi literasi politik. Perempuan yang terlibat langsung dalam sistem politik akan tahu permasalahan atau kebutuhan khusus perempuan seperti kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Latar belakang terhadap orientasi praktis

Latar belakang sehingga KPI berorientasi praktik adalah yang pertama; perempuan belum dapat porsi memperjuangkan hak nya sendiri, kedua; memutus depolitisasi hak perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh presidium KPI Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“Apa yang dirasakan perempuan keluh kesahnya dalam legal drafting harus diperjuangkan oleh wakil perempuan itu sendiri supaya kebijakan itu memang mengena. misalnya saat ini kita tahu kalau perempuan lagi PMS sakitnya bagaimana. Laki-laki kan gak pernah tau dan merasakan susahnyanya dan sakitnya mens itu seperti apa, yang tahu kan perempuan. Sekarang muncul UU ketenagakerjaan yang mengatur tentang cuti haid bagi perempuan, dulu tidak ada, lalu siapa yang bisa mendorong kebijakan itu yaitu perempuan. Maka perempuan harus berani masuk dalam system, harapannya kami bisa memperjuangkan hak-hak mereka dan kebaikan bersama. Jadi inilah yang kami akan sadarkan pada setiap caleg yang atau kelompok-kelompok kepentingan perempuan yang beraliansi dengan kami.” (Wawancara tanggal 16 Maret 2019).

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan terlibatnya perempuan dalam politik untuk menjadi wakil politik secara langsung maupun tidak langsung berdampak bagi kesejahteraan perempuan. Masalah perempuan yang sering dilupakan sampai pada soal terkecil, yakni masalah kesehatan reproduksi seperti cuti haid bagi buruh perempuan yang mengalaminya. Kebutuhan khusus tersebut hanya dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri, jika perempuan berperan maksimal dan potensial membela apa yang menjadi kebutuhan perempuan maka andil

perempuan akan mendatangkan dampak keadilan politik yang dirasakan oleh kelompok perempuan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian atau porsi yang cukup.

Perempuan sudah masuk kedalam seluruh bidang ekonomi kebijakan-kebijakan terkait perlindungan perempuan dibidang tersebut harus di kaji lagi terlebih jika perempuan menjadi wakil rakyat akan lebih peka dengan permasalahan perempuan. Kebijakan yang lama misalnya menyamakan antara kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat menjadi perhatian lagi. Pendapat ini juga didukung oleh pernyataan Septy Eka Nugroho anggota KPI Jawa Timur sebagai berikut.

“Sederhanya nya begini, kami teman-teman KPI punya guyonan dan selalu menganalogikan seperti ini, “ Jika Bapak punya uang Rp. 10.000, ibu juga memiliki uang Rp. 10.000. kira-kira kalau bapak yang punya uang akan dibelikan rokok, tapi kalau ibu punya uang 10.000 maka akan di belikan kebutuhan pokok”. Rokok kebutuhan bapak saja, tapi bahan pokok adalah kebutuhan sekeluarga. Artinya apa ? kenapa perempuan harus terwakilkan harus berpartisipasi aktif? Begini simplenya kalau statementnya perempuan itu dibuat bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka saja, tapi mereka pasti mempertimbangkan untuk kebutuhan bersama. Tetapi perlu di ingat juga tidak semua laki-laki seperti analogi tersebut, namun simplenya seperti itu.” (wawancara, 23 Maret 2019).

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, dapat menggambarkan bahwa jika perempuan diberi ruang dalam politik misalnya menjadi wakil akan menguntungkan bagi tatanan demokrasi yang berkeadilan karena permasalahan perempuan itu tidak semuanya diketahui oleh politisi laki-laki dan hanya perempuan yang mengetahuinya, sehingga mengharuskan perempuan untuk masuk dalam sistem politik, kesadaran perempuan sendiri harus terbuka melalui kegiatan literatif bahwa perempuan mempunyai masalah dan memiliki potensi untuk mengatasi keadaan marjinalisasi dan ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu dengan sifat keibuan yang dimiliki perempuan akan lebih peka dalam kebijakannya akan berdampak menyeluruh bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk kesejahteraan ibu, anak, dan ayah. Latar belakang kedua adalah maraknya depolitisasi perempuan jika perempuan sendiri tidak andil atau terlibat dalam politik, seperti yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...Tidak semua kebutuhan perempuan dipahami anggota legislatif laki-laki, tetapi publik selalu beralibi bahwa kebutuhan perempuan sudah pasti

dipenuhi anggota legislatif laki-laki, mindset ini yang harus di buang.”(Wawancara tanggal 16 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut mendeskripsikan bahwa publik merekonstruksi bahwa kebutuhan perempuan sudah diakomodasi oleh legislatif laki-laki. Namun perempuan harus menyadari bahwa hal demikian tidak menjamin keadilan dan demokratisasi tetapi akan melanggengkan subordinasi dalam peran. Perempuan akan lebih baik terlibat dalam politik memperjuangkan hak-hak dan kewajiban.

Contoh problematika perempuan harus disampaikan kepada perempuan sehingga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik perempuan langsung untuk memutus depolitisasi terhadap hak-hak perempuan dalam segala bidang, terutama di daerah Jawa Timur. Masalah perempuan bagi warganegara perempuan, kurang dipahami dengan serius. Akses keadilan dan perlindungan hukum bagi buruh perempuan dalam tempat kerja adalah satu contoh permasalahan perempuan yang masih kurang regulasi. Perempuan sudah banyak bekerja dalam sektor ekonomi yang beragam, maka regulasi dan kebijakan juga harus menyertai perempuan. Pendapat ini sejalan dengan komentar Aghata Retnosari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP, yang juga narasumber KPI Jawa Timur dalam memberikan literasi politik terhadap perempuan sebagai berikut.

“...Literasi politik bagi perempuan itu urgent, karena apa? Banyak hak perempuan diakui tetapi sekaligus diingkari, tetapi perempuan tidak sadar akan hal itu. Misalnya tersedia UU tentang perlindungan perempuan seperti dari KDRT dan kekerasan seksual, tetapi penagakannya masih terhalang tirai besi akibat persepsi victim blaming (menyalahkan korban) di negara kita, kebiasaan menyalahkan korban sangat dipengaruhi budaya patriarki. Fenomena ini membuat perempuan takut melapor dan adanya UU terasa nihil. Itu contoh dari sekian banyak UU yang digagas untuk perempuan tetapi justru diingkari. Tujuan kita memberi pemahaman ini supaya apa, agar perempuan jangan diam saja jika nasibnya dibicarakan tanpa terlibat.” (Wawancara, 30 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa perlunya edukasi politik terhadap perempuan dan menggagas isu-isu problematika perempuan sendiri dalam mencapai hak politiknya untuk menyadarkan baik konstituen dan caleg perempuan. Kendati terdapat undang-undang yang menjamin hak perlindungan perempuan tetapi masih terdapat masalah sensitif terhadap penagakannya dan harus melibatkan perempuan untuk meresonansi dan menyuarakan secara komprehensif terhadap penerapan yang salah

pada suatu undang-undang agar hak perempuan benar-benar tercapai. Pemberlakuan undang-undang yang pro terhadap perempuan tidak hanya dibuat untuk formalitas saja, yang tidak ubahnya seperti praktik depolitisasi hak perempuan. Artinya, perempuan sendiri harus terlibat dalam politik praktis.

Cara konkret pelaksanaan literasi yang berorientasi praktis

Cara yang ditempuh KPI Jawa Timur dalam kegiatan pendidikan politik, yakni dengan mendidik dan mengawal perempuan caleg maupun pemilih perempuan. Bukti bahwa cara KPI Jawa Timur adalah mendidik adalah sebagai mana yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...untuk merancang asas dan prinsip organisasi ini, Ibu Mascruha yang memberi ide untuk mengembalikan citra demokrasi untuk perempuan bukan dengan jalan advokasi seperti banyak LSM lain, tapi dari *mindset* yang terus dibangun layaknya kampanye-kampanye sistematis yang sudah dilakukan rezim Soeharto sampai perempuan harus menurut dalam sikap dan pandangan politiknya. Maka, untuk mengembalikan citra itu butuh proses berkesinambungan berkelanjutan sampai perempuan itu sadar hak dan kewajibannya adalah setara dan berani untuk memperjuangkan nasibnya yang selama bertahun-tahun terisolasi. Ya cara ampuhnya adalah mendidik, memberi pengetahuan.”(wawancara tanggal, 16 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut mendidik adalah langkah awal dari prinsip organisasi KPI dalam memberdayakan politik perempuan, agar perempuan masuk dalam ranah politik. Perlu penyadaran akan potensi, dan kapasitas perempuan. Memberikan ruang untuk membuktikan dan mengubah citra politik perempuan yang telah lama masyarakat konstruksi layaknya kampanye sistematis. Mendidik dapat menguatkan kapasitas aktor politik yang maju, perempuan perlu didikan dalam berpolitik karena banyak hambatan domestik yang membayangkannya di samping hambatan struktural dalam politik seperti kecurangan dan kurang vokal suara atau pendapat perempuan dalam pengambilan keputusan. Sementara cara yang ditempuh dalam pendidikan politik tersebut menurut Septy Eka Nugroho adalah sebagai berikut.

“...ToT adalah singkatan dari *Training of Trainer* berarti pelatihan untuk melatih dengan materi pendidikan berpolitik untuk mengawal dan pendidikan politik untuk memilih, selain itu untuk caleg yang kami kawal akan ada workshop caleg...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut mendeskripsikan bahwa sasaran kegiatan literasi politik dilakukan dengan

melakukan pendidikan yakni, kepada pemilih. Pendidikan terhadap pemilih dilaksanakan untuk menjamin kelompok pemilih perempuan yang rentan dan kurang informasi terkait menjadi pemilih yang cerdas dan melek akan hak dan suaranya, akan sadar dan paham posisi mereka dalam demokrasi dan menghindari diri dari bentuk-bentuk kecurangan. Pendidikan politik terhadap pemilih awalnya dilaksanakan oleh kader-kader KPI dari semua tingkat kekuasaan di Jawa Timur untuk kemudian menjadi relawan pemilih yang mengajari perempuan di tingkat cabang dan balai agar menjadi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab, mandiri dalam pilihan politiknya. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur yakni Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“TOT Pendidikan Pemilih mapupun pemantau dilaksanakan untuk melahirkan kader-kader yang siap melatih anggota Balai Perempuan. ToT dilaksanakan di KPI Wilayah seperti seminar dan mengundang berbagai elemen kepentingan perempuan yang bertempat pada cabang. Pasca pendidikan pemilih ini, setiap peserta akan diminta komitmennya untuk melakukan pendidikan politik pemilih sekurang-kurangnya pada tetangganya dan apabila memang bersedia menjadi pemantauan seiring dengan agenda pemantauan yang telah dilakukan selama 2 bulan atau mulai dari pemungutan suara hingga penetapan pemantau ini tugasnya nanti akan mengawal pemilih perempuan untuk memeriksa DPT, dan mengawasi segala macam bentuk kecurangan yang melibatkan perempuan. Langkah kami ini juga berkoordinasi dengan BAWASLU Provinsi sebelum kami melakukan upaya tersebut.” (Wawancara tanggal, 27 Maret 2019)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa melalui kegiatan melatih pelatih (ToT) pemantau dan pemilih adalah bagian integral untuk membuat semua elemen perempuan diakar rumput berdaya. Mengingat sasarannya adalah perempuan luas bukan hanya dari anggota KPI, namun relawan demokrasi perempuan bisa mengikuti pelatihan untuk terjun langsung mengawasi jalannya pemilu. Peserta pemilih juga diberikan pelatihan agar menjadi pemilih bertanggung jawab, dilaksanakan agar tercipta keaktifan, keterlibatan, dan kemandirian politik untuk mengubah stigma buruk perempuan dalam politik misalnya rentan terhadap *money politics*.

Selain pendidikan untuk pemilih dan pemantau, agar perempuan terlibat praktis dan mandiri dalam berpolitik. Kegiatan untuk mendidik wakil perempuan supaya terlibat praktis menjadi calon legislatif, yakni *workshop*/temu caleg untuk membahas survei

keterpilihan dan meningkatkan kaderisasi serta pengetahuan mereka tentang politik dan gender. Pernyataan ini di dukung oleh pendapat Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...dalam proses *workshop* artinya caleg-caleg dari berbagai partai yang kami pertemukan dalam satu forum mau belajar dan mau dukungan, dan setidaknya sevisi misi dengan kita. Kita tahu partai politik pengusung tidak sampai sejauh itu memetakan kemenangan perempuan, sementara bagi kami mereka adalah berlian yang akan kami kawal suaranya perempuan sampai akar rumput.”(wawancara tanggal 27 Maret 2019) .

Dalam kegiatan temu caleg ini syarat akan pendidikan politik dan kaderisasi yang kurang dilaksanakan partai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Septy Eka Nugroho sebagai berikut.

“...agenda *workshop* bagi caleg perempuan maupun kader partai adalah mereka kami ajak analisis PERDA Provinsi Jawa Timur misalnya, untuk perempuan dan anak serta membahas TUPOKSI legislatif, jangan sampai perempuan yang kami kawal tidak tahu tugasnya apa, bahkan tidak berpihak pada anak dan perempuan...”(wawancara tanggal 29 maret 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa terdapat pendidikan bagi caleg agar memiliki visi-misi dan kaderisasi yang paham akan tugas legislatif dan sensitifitas gender sehingga dapat membawa isu-isu politik perempuan jika terjun dalam politik praktis. Cara konkret kedua adalah dengan mengawal, pengawalan menjadi agenda penting yang lebih kedalam praktik dan pengalaman. Sedangkan pendidikan politik lebih terhadap pemahaman dan mengorganisir pengetahuan politik. Alasan dalam mengawal dapat disampaikan dalam cuplikan wawancara oleh presidium KPI Jawa Timur yakni Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...perempuan kalau terjun dalam dunia politik itu masih banyak yang bayangi dia mbak, contohnya saja perempuan harus bekerja keras mencari suara dengan *start* yang berbeda dengan politisi laki-laki yang secara umum lebih berpengalaman dan bermodal. Rentan cukong-cukong partai yang mengahantui perempuan yang sekiranya hanya menjadi alat administratif partai. Perempuan cenderung tidak punya modal materi dan moril apalagi tidak ada dasar berorganisasi atau adanya dukungan elit maka akan sulit bagi mereka. Tambah lagi “budaya” setor suara, jual beli suara, penghilangan suara hingga perusakan suara sering terjadi dan membuat perempuan gagal menjadi anggota legislatif. Strategi dan upaya pemenangan yang dilakukan caleg perempuan sering sekali tidak

sampai mengantarkan caleg pada pemenuhan kuota 30% perempuan di legislatif karena bentuk-bentuk kecurangan...”(Wawancara tanggal, 16 Maret 2019).

Berdasarkan pendapat dalam cuplikan wawancara tersebut mengungkapkan bahwa terdapat hambatan caleg perempuan dalam berpolitik yang rentan menjadi alat politik tanpa memperhitungkan potensi, KPI Jawa Timur tidak akan membiarkan perempuan pasif dan diam saja. Cara yang diselenggarakan KPI Jawa Timur agar perempuan berkualitas masuk kedalam tampuk sistem politik dengan cara mengawal dan mendidik.

Materi pendidikan politik yang berorientasi praktis

Calon wakil rakyat yang dikaderisasi oleh KPI belajar beberapa materi yang mengarah untuk mendukung praktik perempuan dalam menjadi legislatif, seperti yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...Kader perempuan harus tahu partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik dan sebagainya. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, vote getter yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa memotong jalur tanpa mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada, apa maknanya UU afirmatif yang baru terus kalau fakta itu yang terjadi. KPI mau perempuan tidak terperdaya oleh partai, justru mereka mewarnai partai untuk demokrasi yang baik...” (Wawancara tanggal, 27 Maret 2019).

Berdasarkan cuplikan tersebut mendeskripsikan bahwa tidak akan bermakna kebijakan afirmatif mengamanatkan kepada partai politik sebagai gerbang pengantar wakil-wakil perempuan untuk menjadi wakil apabila perempuan sendiri tidak mengetahui fungsinya dalam partai. Fungsi partai adalah mengadakan proses kaderisasi dan mendidik perempuan, tugas perempuan dalam partai adalah mengikuti proses tersebut, bukan menjadi *tools* (alat kekuasaan). Materi yang paling penting adalah mengetahui fungsi partai sebagai gerbang rekrutmen dan melaksanakan kaderisasi sehingga perempuan lebih cerdas ketika menjadi kandidat partai dan mewarnai partai. Pendapat ini sejalan dengan anggota dewan Provinsi Jawa Timur dari komisi E fraksi PDI-Perjuangan sebagai berikut.

“...berdasarkan pengalamanku dalam partai PDIP selama hampir 6 tahun ini, saya harus menyampaikan jangan takut masuk partai,

jadilah pengurus, jadilah kader dengan ikut prosesnya, dalam partai sudah pasti diberikan pendidikan politik, jangan mau kalau tidak dilibatkan proses tapi dicalonkan...”(wawancara tanggal, 30 Maret 2019)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa kader partai harus menyampaikan pengalamannya di partai politik. Proses pendidikan politik harus dilaksanakan agar dapat menjalankan peran dan fungsi di partai politik. Tujuan tersebut mengarah agar perempuan tidak lagi menjadi alat kelolosan partai. Selain materi tentang fungsi parpol, terdapat materi analisa Peraturan Daerah yang responsif gender sebagaimana yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut .

“...transparansi PERDA yang menyangkut masalah anak dan perempuan kita sampaikan dalam pertemuan caleg, dengan dibimbing oleh narasumber yakni legislatif reses mereka akan tahu dan sadar apa yang jadi problem perempuan dan anak...”(wawancara presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh, tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan penuturan tersebut menggambarkan harapan yang besar supaya caleg perempuan memiliki sikap dan komitmen keberpihakan terhadap anak dan perempuan, seperti pernyataan Aghata Retnosari selaku anggota dewan Provinsi komisi E fraksi PDIP sebagai berikut .

“Sosialisasi PERDA yang sudah kita kerjakan tidak berarti apa-apa jika perempuan sendiri atau calegnya tidak mengerti permasalahan perempuan. Karena kalau mau buat peraturan harus jelas naskah akademiknya, jelas untuk masalah anak dan perempuan saya sampaikan ke mereka kamu akan menemukan undang-undang yang kelihatannya berpihak pada perempuan tapi justru tidak bermakna untuk perempuan dalam penegakannya contohnya RUU PKS yang sampai saat ini jadi polemik” (Wawancara tanggal, 30 Maret 2019)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap peraturan harus selaras dengan pemahaman tentang kompleksitas masalah perempuan, maka KPI bersama dengan anggota dewan memberikan materi kajian peraturan bersamaan dengan pemahaman sensitifitas gender. Pendidikan bagi pemilih dalam ToT terdapat beberapa materi untuk mendukung kearah praktis, diantaranya adalah seperti yang diungkapkan oleh Septy Eka Nugroho sebagai berikut.

“...materi terkait demokrasi, partisipasi perempuan dalam demokrasi, penyelenggara pemilu, tata cara pemilihan umum, mengawal pemilu, kontrak politik dan pemilih bertanggung

jawab dalam Balai Perempuan materi ini disampaikan dalam kegiatan ToT juga...” (wawancara tanggal, 29 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa untuk membuat perempuan terlibat dalam politik praktis tidak hanya menjadi wakil saja, tetapi menjadi perempuan pemilih yang cerdas tentang materi demokrasi, dan pemilih yang sadar akan tanggung jawab. Kegiatan tersebut sebagai wujud partisipasi perempuan pada tingkat akar rumput untuk mendorong kemandirian suara perempuan dan mengawal kebijaksanaan perempuan dalam pandangan politik.

Orientasi yang mengarah terhadap tindakan praktis dengan cara mendidik dan mengawal dalam proses literasi politik guna memberikan pengetahuan dan kesadaran akan menjadi pemilih bertanggung jawab dengan jalan mengawal. Efektif untuk memberikan kontribusi praktis bagi perempuan yang ingin melihat langsung problematika perempuan dalam demokrasi.

Relawan-relawan yang dibentuk oleh KPI Jawa Timur yang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur melalui *training of tentor* (ToT). Pelatihan ToT jika dilaksanakan, secara praktis dapat berkontribusi untuk memantau pemilu dan mengawal demokrasi. Manfaat lain yang bisa didapat adalah mengetahui posisi perempuan secara langsung yang awalnya hanya diketahui berdasarkan konstruksi dan alibi tentang masyarakat. Hasilnya selama menjadi pengawal memang perempuan rentan terhadap kesalahan membaca Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga jika tidak ada pengawasan dan pengawalan dari sesama perempuan, tidak jarang perempuan tersebut menjadi sasaran untuk pengelembungan suara terutama dari kelompok lansia, disabilitas, dan kelompok perempuan adat.

Orientasi Demokratisasi

Konsep demokrasi bukan hanya bicara tentang kekuasaan belaka, tetapi juga bicara tentang kehidupan dan kemanusiaan atau kebaikan bersama seperti keadilan dan kesetaraan yang hendak dicapai. Hakikat demokrasi yang sesungguhnya akan dimaknai KPI Jawa Timur dalam memberikan literasi politik. Demokrasi tidak bermakna apabila hak dan kewajiban antar warga negaranya memiliki sekat diskriminasi, sedangkan prinsip dari demokrasi sendiri adalah bebas dan setara. Usaha dalam mewujudkan iklim demokrasi tersebut telah dilaksanakan pemerintah, seperti mengupayakan berbagai prinsip non diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses partisipasi politiknya. Arena politik di Indonesia telah didominasi gaya politik maskulin akibat konstruksi kultur baik di tatanan masyarakat maupun pemerintah pada zaman Orde Baru.

Latar belakang orientasi

Pasca Reformasi berlangsung di Indonesia, keterlibatan perempuan dalam politik khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi fokus penting bagi aktivis dan juga pemerintah. Terobosan kebijakan digulirkan terutama kebijakan afirmasi dan penguatan peran perempuan dalam politik terus menjadi fokus. Kebijakan *affirmative action* menjadi harapan untuk menghancurkan stigma domestikasi peran perempuan selama Orde Baru.

Perempuan mulai menemukan ruang untuk menuntut kesetaraan ruang dalam politik. Kebijakan afirmasi untuk mengakomodasi partisipasi perempuan dalam politik pertama dirumuskan tahun 2002, terbit Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, yang menginisiasi keadilan gender dalam kepemimpinan partai politik. Namun faktanya yang ditemui di lapangan masih terdapat pesimisme dari kelompok perempuan yang akan maju menjadi aktor politik padahal sudah diproteksi oleh undang-undang. Jika keadaan ini terus-menerus berjalan maka akan menggerus demokrasi dengan hakikat bebas dan setara serta keadilan akan kurang..

Revisi kebijakan kuota afirmasi tidak membawa hasil yang signifikan jika pengetahuan dasar oleh perempuan sendiri tentang politik belum tersadarkan. Undang-undang yang ada justru terdepolitisasi oleh partai politik untuk mengusung perempuan hanya sebagai syarat lolos pemilihan legislatif (pileg), kondisi seperti ini, membuat keterwakilan perempuan hanya bermakna sebatas kuantitas bukan dari kadar kualitas. Padahal jika perempuan ini di kaderkan dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan perempuan, maka saat duduk dalam posisi parlemen akan membawa perubahan berarti untuk kebijakan yang menyejahterakan kaum perempuan yang selama ini porsinya kurang. Seperti pernyataan presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...Keberadaan kuota 30% perempuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 2012 itu kemajuan. Tetapi hal ini tidak berarti perempuan telah memiliki jatah kursi legislatif. Pileg Kabupaten/Kota di Jawa Timur itu tahun 2014 ada 16 partai yang ikut mbak ya semua mencalonkan 30%, kalau tidak mencalonkan maka partainya tidak lolos kualifikasi artinya tidak boleh ikut pertarungan pileg. Tetapi kok ya lihat potret keterwakilan di bangkalan tidak ada satupun perempuan yang nyantol atau kepilih, berarti, angka 30% itu artinya untuk syarat saja, tidak benar-benar memetakan kader perempuan untuk menang dan mewakili parlemen dan memperjuangkan hak kita...”(wawancara, tanggal 16 maret 2019).

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat mendeskripsikan bahwa dengan adanya kebijakan kuota

semua partai peserta pemilu telah bersedia memenuhi persyaratan kebijakan afirmasi, tetapi disisi lain tidak semua partai yang sudah mencalonkan caleg perempuan berorientasi terhadap kemenangan caleg perempuan tersebut. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa partai politik tidak benar-benar mengkader caleg perempuan dan memetakan kemenangan untuk keterwakilan perempuan, hanya sebatas memenuhi syarat administratif. Pendapat ini juga disampaikan oleh Heriyanto Ananda selaku dinas perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak (PPPA) yang juga merupakan *partner* KPI dalam melakukan sosialisasi yang menyangkut potret problematika perempuan di Jawa Timur sebagai berikut.

“...keterwakilan politik yg kami lihat dipartai kadernya minim, yang banyak itu adalah partisipan partai/pengurus partai perempuan banyak. Maka UU keterwakilan perempuan di legislatif perlu diperhatikan, kita sekarang sulit mencapai 30% karena apa perempuan diadu oleh laki-laki yang 70% yang 30% perempuan, yang tadinya asal pasang oleh partai dalam arti pengurus partai bukan dari kader yang *qualified*, jadi tetap kalah sama laki-laki. Kami harapkan ada proteksi UU atau pengakajian lagi terhadap undang-undang afirmasi, apalagi untuk proteksi yang 30%...” (wawancara tanggal 01 April 2019).

Berdasarkan cuplikan pendapat staff dinas PPPA, selaku narasumber aktif yang bekerja sama dengan KPI Jawa Timur dalam upaya memberikan literasi politik terhadap perempuan, mengungkapkan bahwa angka 30% kuota perempuan dalam pencalonan legislatif oleh partai politik itu komposisinya lebih banyak partisan atau pengurus partai, dimana pengurus tersebut diminta untuk memenuhi kuota 30% itu sebagai syarat kelolosan partai. Pendapat ini juga mengungkapkan bahwa partai kurang memperhatikan kualitas kader yang akan bertarung dengan caleg laki-laki.

Minimnya kaderisasi perempuan, maupun literasi politik berkesetaraan untuk konstituen menjadikan kepercayaan terhadap kualitas perempuan kurang diperhitungkan. Maka untuk mendukung adanya sebuah regulasi, diperlukan semangat membangun pengetahuan dasar kelompok perempuan untuk mengerti tentang hakikat demokrasi sesungguhnya yakni, bebas, adil, dan setara. Pelaksanaan dalam mengembangkan organisasi memiliki misi pemberdayaan politik perempuan untuk mewujudkan keadilan demokrasi seperti pada visi KPI Jawa Timur.

Cara konkret mencapai orientasi demokratisasi

Upaya organisasi KPI Jawa Timur dalam mengembalikan demokratisasi yang bermakna keadilan, dan kesetaraan diperjuangkan melalui pendidikan politik sebagai asas dan prinsip organisasi untuk memberdayakan perempuan dalam politik. Ruang-ruang politik perempuan selama ini telah terkonstruksi dengan berbagai hambatan struktural, dan kultural yang

berimplikasi terhadap citra perempuan dalam berdemokrasi yang dianggap hanya *“the second human being”*.

Cara-cara yang di tempuh KPI Pusat maupun Jawa Timur sejatinya menunjukkan bahwa pendidikan politik perempuan yang dilakukan untuk mengembalikan citra dan keterlibatan politik perempuan sehingga makna demokrasi dapat tercapai. Seperti pendapat dari Zakiyatul Munawaroh selaku Presidium KPI Jawa Timur sebagai berikut, “Paling gampangnya yang jelas program utama kami ya mendidik perempuan untuk *back to democracy...*” (Wawancara tanggal 16 maret 2019). Pendapat serupa juga didukung oleh pernyataan Septy Eka Nugroho yang setuju bahwa demokrasi harus diluruskan dengan jalan mendidik

“...ibaratnya mencabut akar ilalang yang sudah melekat sangat kuat dalam tanah dan mendominasi tanaman lain, kemudian kita berusaha ingin menanamnya kembali dengan benih tumbuhan yang bermanfaat. Kita bisa saja tidak susah-susah untuk mencabut akarnya, dan menebas ilalang itu, tapi tidak lama tumbuhan yang kita tanam akan kalah. Rezim Orba berhasil mengkampanyekan secara sistematis seakan-akan perempuan itu adalah tanggung jawab negara, dimana negara dipegang bapak pasti perempuan senang, tak dipungkiri akhirnya terjadi spesialisasi, pelabelan, stereotipe terhadap peran perempuan, ditambah lagi kondisi kultur di banyak suku di Indonesia bagaimana memperlakukan dan mempersepsi perempuan itu sama tidak jauh berbeda dengan rezim itu. Maka dari itu tugas kita mencabut akar itu menanam kembali dengan bibit-bibit pengetahuan yang benar...” (Wawancara tanggal 23 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut mendeskripsikan bahwa untuk mengembalikan demokrasi yang bebas dan setara diperlukan pengetahuan terhadap pelaku politik perempuan. Melibatkan Perempuan untuk berpolitik akan mendukung demokrasi yang setara, secara tidak langsung citra dan potensi perempuan akan juga diperhitungkan dalam demokrasi. Jalan untuk mengembalikan adalah mendidik pelaku politik perempuan.

Materi berorientasi demokratisasi

Materi dalam kegiatan literasi yang mengarah untuk perbaikan demokrasi dan citra perempuan dalam berpolitik ini disampaikan oleh Septy Eka Nugroho sebagai berikut.

“...kami tentunya membahas materi tentang demokrasi secara konsep dan secara faktual pelaksanaannya saat ini terutama lebih mengarah kepada millennial seperti mbak sekarang ini, partisipasi perempuan dalam demokrasi, penyelenggara pemilu, tata cara pemilihan umum, mengawal pemilu, kontrak politik dan pemilihan.” (wawancara tanggal, 29 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kegiatan literasi berorientasi kepada pelajaran yang demokratis. Perempuan harus paham makna demokrasi sebenarnya, sehingga paham lama yang menyampingkan perempuan dalam demokrasi sudah tidak ada lagi. Perempuan sudah memiliki pemahaman dan kesadaran akan partisipasi perempuan adalah untuk menciptakan demokrasi yang adil, bebas, setara, dan sejahtera. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, SARA dalam akses hak dan kewajiban politik.

Orientasi terhadap Gender Egalitarian

Memilih perempuan dalam menjadi wakil sangat perlu dipertimbangkan dewasa ini, dengan adanya perkembangan industrialisasi 4.0 mengakibatkan perempuan juga berkuat pada sektor publik. Aturan-aturan lama yang lebih memihak kelompok laki-laki harus dikaji ulang. Perempuan potensial yang berspektif terhadap gender bagi kepemimpinan sangat diperlukan. Oleh sebab itu terdapat alasan organisasi KPI yang membuktikan bahwa orientasi mengarah kepada pemahaman praktis kepada konstituen dan wakil perempuan tentang gender dalam segala bidang kehidupan termasuk kebijakan politis.

Latar Belakang berorientasi gender egalitarian

Literasi politik yang dilakukan oleh KPI Jawa Timur menasar kepada kelompok perempuan, yang beranggotakan individu-individu dari berbagai macam kelompok kepentingan, melakukan upaya yang sistematis untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan memastikan keterwakilan kelompok kepentingan di semua tingkatan. Oleh sebab itu KPI juga mengupayakan agar perempuan memilih perempuan, pernyataan ini didukung oleh cuplikan wawancara kepada anggota KPI Septy Eka Nugroho sebagai berikut.

“...tujuan kami adalah melakukan komitmen bersama untuk pengawalan suara perempuan. Kita dorong perempuan untuk memilih perempuan seperti yang dideklarasikan KPI. Harapan kami ayolah perempuan ambil bagian, artinya, ambil bagian perempuan bukan hanya sebagai simbol representasi kekuasaan. Perempuan diakui tetapi juga dapat menginfluence kepentingan...”(wawancara tanggal 23 Maret 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat menggambarkan pentingnya perempuan untuk masuk ranah politik bukan sekedar untuk rekognisi (pengakuan) saja, tetapi harus mampu menjalankan *redistribusi power*. Banyak manfaat ketika perempuan mewakili kelompoknya salah satunya memperjuangkan hak-hak sensitif perempuan dan anak. Peletakan politisi berjenis kelamin perempuan secara kuantitas tidak menjamin keberpihakan kebijakan telah diperjuangkan

untuk perempuan dan anak. Perlu adanya literasi politik bagi konstituen dan wakil perempuan untuk memiliki wawasan gender sehingga memunculkan kesadaran bagi pemilih maupun caleg perempuan untuk bersama-sama saling mendukung dan mengawal kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak. Melalui Literasi politik yang dilakukan oleh KPI Jawa Timur mendorong perempuan mengawal suara perempuan, perempuan memilih wakil yang berspektif gender, hal ini sejalan dengan pendapat presidium KPI Jawa Timur yakni Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“... harus kita ingat bahwa KPI mendeklarasikan perempuan pilih perempuan tetapi perempuan yang benar-benar potensial dalam artian sensitif gender, visi-misinya jelas menguntungkan kita dan semuanya. Bukan perempuan yang sebagai pelengkap misalnya, partai X ini lengkap perempuannya maka maju saja kami tidak mungkin merekomendasikan mereka, dan tidak mungkin dia jadi atau terpilih, kalau dia terpilih nanti mereka tidak bisa memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Kami pastikan isu-isu itu diusung mereka, gak hanya *angger wedok* terus dipilih...” (Wawancara tanggal 16 Maret 2019)”

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut mendeskripsikan bahwa, kegiatan literasi politik perempuan tujuannya adalah untuk mendeklarasikan agar perempuan memilih wakil perempuan, tetapi dengan kesadaran gender. KPI Jawa Timur tidak merekomendasikan untuk asal memilih perempuan sebagai formalitas, tetapi juga mengimbau agar mengetahui visi-misi caleg yang sensitif gender, tentunya juga didukung oleh konstituen yang paham gender oleh karena itu KPI Jawa Timur memberikan literasi politik terhadap konstituen perempuan dan caleg perempuan. Tujuan melakukan literasi politik adalah mengawal suara perempuan, bahkan konstituen perempuan juga dibimbing untuk mengambil bagian dari proses politik supaya tercapai esensi kehadiran perempuan yang sesungguhnya. Esensi organisasi melakukan literasi politik bukan sekedar alibi perempuan memilih perempuan, tetapi pengetahuan gender benar-benar *include* dalam proses penyadaran konstituen maupun caleg, bahkan KPI Jawa Timur tidak segan untuk memilih wakil laki-laki tetapi dengan catatan potensial gender.

Cara konkret mewujudkan orientasi gender egalitarian

Upaya yang menunjukkan bahwa arah KPI Jawa Timur mengarah kepada menumbuhkan perspektif gender seorang pemimpin perempuan dan memilih pemimpin yang berspektif gender juga didukung oleh cara-cara yang edukatif, seperti program *workshop* caleg dimana caleg-caleg yang dihimpun harus paham

akan permasalahan gender, harus paham permasalahan perempuan dan anak. Sehingga kehadiran perempuan menjadi wakil akan menepiskan bias gender dalam tiap kebijakan dan langkah perempuan dalam ruang publik. Pendapat ini didukung oleh pernyataan presidium KPI Jawa Timur yakni Zakiyatul Munawaroh Sebagai berikut.

“...ibu Aghata Retno yang telah banyak mengungkapkan pengalaman dan berbagai PERDA yang responsif gender menjadi pemateri dan pendidik karena mereka juga berkewajiban melakukan tugas untuk menyampaikan pendidikan politik itu, kampanye visi misi di seluruh basis suara kepentingan KPI yang dipertemukan di tingkat wilayah, cabang sampai balai...”(wawancara tanggal 27 Maret 20)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat menggambarkan upaya untuk memasukkan perempuan dalam perwakilan politik harus disertai wawasan gender agar kebijakan yang dihasilkan tidak berparas maskulin. Agar mengetahui problematika yang dialami perempuan di Jawa Timur maka anggota dewan harus terlibat melakukan *hearing* dan bertemu kelompok-kelompok masyarakat.

Materi orientasi gender egalitarian dalam literasi politik

Kegiatan *workshop* caleg terdapat beberapa materi yang diberikan salah satunya adalah kajian peraturan yang responsif gender, dimana pematerinya adalah juga anggota dewan Provinsi Jawa Timur dalam proses temu caleg yang diselenggarakan KPI Jawa Timur, mereka akan memaparkan beberapa aturan yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak. Pendapat ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh presidium KPI Jawa Timur Zakiyatul Munawaroh sebagai berikut.

“...transparansi PERDA yang menyangkut masalah anak dan perempuan kita sampaikan dalam pertemuan dan workshop caleg, dengan dibimbing oleh bu Aghata dan pak Nanda mereka akan tahu dan sadar apa yang jadi problem perempuan dan anak.”(wawancara, tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa KPI Jawa Timur melakukan sosialisasi yang telah dilakukan DPRD Provinsi. Sosialisasi itu diadakan pada saat kegiatan temu caleg. Harapan yang besar adalah agar caleg perempuan memiliki sikap dan komitmen keberpihakan terhadap anak dan perempuan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Aghata Retnosari selaku anggota dewan provinsi komisi E fraksi PDIP sebagai berikut.

“Sosialisasi yang sudah kita kerjakan tidak berarti apa-apa jika perempuan sendiri opo calegnya tidak ngerti permasalahan perempuan, karena kalau mau buat peraturan harus jelas naskah

akademiknya, jelas untuk masalah anak dan perempuan saya sampaikan kepada perempuan kamu akan menemukan undang-undang yang kelihatannya berpihak pada perempuan tapi justru tidak bermakna untuk perempuan dalam penegakannya contohnya RUU PKS yang sampai saat ini jadi polemik.” (Wawancara tanggal, 30 Maret 2019)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman harus selaras dengan pemahaman tentang kompleksitas masalah perempuan, maka KPI Jawa Timur bersama dengan anggota dewan memberikan materi kajian bersamaan dengan pemahaman sensitifitas gender.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa orientasi KPI Jawa Timur dalam melakukan literasi politik untuk mendorong penguatan perempuan dalam politik cenderung terhadap pemberdayaan politik yang mengarah kepada tindakan partisipatoris (keterlibatan perempuan dalam politik praktis), demokratisasi, dan gender egaliter, melalui kegiatan mendidik dan mengawal supaya tercapai arah tersebut. Melihat berbagai realitas masalah politik praktis yang dialami perempuan, melalui kegiatan edukatif seperti ToT pemantau dan pemilih, *workshop* caleg dan pengawalan caleg serta seminar pada akar rumput. Tidak hanya berhenti pada titik kesadaran tetapi juga melakukan aksi-aksi atau tindakan nyata untuk penguatan peran perempuan dalam politik dari semua kelompok kepentingan perempuan yang bernaung dengan KPI Jawa Timur, sehingga dapat membentuk pengetahuan masyarakat akan politik yang berkesetaraan.

Relevansi teori yang dikemukakan oleh Habermass terhadap orientasi KPI Jawa Timur melakukan kegiatan literasi politik untuk perempuan berdasarkan teori tersebut menjelaskan bahwa, untuk mencapai *life word* (dunia yang hidup). Habermass berusaha untuk memisahkan pengetahuan dan kekuasaan melalui pengembangan pembebasan, pemberdayaan, dan penarikan diri dari masyarakat yang bertujuan untuk refleksi diri (Habermas, 1984) dalam Thomas (2012:35). Pendapat tersebut dilakukannya karena melihat realitas sosial dimana legitimasi dan dominasi selalu terselubung dibalik rasionalisasi, ideologi dan dogma. Kiprah politik perempuan yang sempat dilarang secara terstruktur dan masif pada era pemerintahan Soeharto dan rasionalisasi dengan dogma-dogma yang seolah-olah baik untuk perempuan, tetapi justru hal tersebut semakin melanggengkan kekuasaan yang patriarkal. Untuk mengembalikan legitimasi terhadap citra perempuan dalam politik tersebut maka stigma, dogma dan ideologi itu harus selesai melalui jalan yang lebih

komunikatif dan edukatif. Terkenal empat konsep dalam teori Habermass yang membangun penelitian ini dan konsep tersebut saling bertahapan yaitu, komunikasi, emansipasi, refleksi diri, dan tindakan Rasional. Tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, komunikasi akan menciptakan masyarakat komunikatif yang tidak ada dominasi dan paksaan, karena dominasi biasanya terselubung dalam suatu rasionalitas ideologi yang terkadang menggelapkan pengetahuan para anggota masyarakat mengenai realitas sosialnya. Situasi seperti ini membutuhkan kritik ideologi melalui pemikiran kritis terhadap realitas sosial dan saling berkomunikasi antarpartisan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang adil dan integratif. Dalam penelitian ini, keadaan sosio-kultural yang membelenggu masyarakat terkait gender yang secara langsung membuat subordinasi peran antara laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi sektor politik. Laki-laki telah mendominasi politik, karena adanya pelabelan gender akibat kondisi kultural yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, menurut teori kritis Habermass untuk menghancurkan stigma tersebut maka perlu menempuh jalan komunikasi untuk dapat membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai perbaikan. Apabila sudah melaksanakan dialog/komunikasi maka akan mencapai suatu keadaan emansipatoris yang hakikatnya manusia inginkan yakni keadaan bebas dan adil dari segi kognitif, normatif dan ekspresi tidak terkecuali bagi kelompok perempuan yang ingin masuk kedalam ranah politik.

Berdasarkan data yang terhimpun dari KPI Jawa Timur bahwa cara untuk mencapai tujuan agar tercapai demokrasi yang egaliter berbasis gender (kesetaraan, kebebasan, keadilan) maka perlu adanya ketercukupan informasi dan kemampuan berfikir dari cara pandang atau ideologi sebelumnya baik terhadap konstituen perempuan dan calon wakil-wakil perempuan. Lokus dari organisasi KPI Jawa Timur adalah mengedepankan literasi politik perempuan dengan metode pendidikan demi penyadaran dan partisipasi perempuan yang membawa perjuangan sipil marjinal. Dengan demikian jika disandingkan dengan teori kritis Jurgen Habermas, aspek pertama untuk mengarahkan penyadaran perempuan dalam berkiprah secara politik yang mandiri dan *power-over*, maka aspek utama untuk mengarahkan kepada penyadaran dan partisipasi perempuan dalam berpolitik adalah komunikasi. Pendidikan yang komunikatif akan membantu masyarakat menuju kedewasaan dan kemandirian berfikir. Bidang pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan komunikasi, tujuan pendidikan bahkan tercapai jika ada

proses komunikasi. Melihat arah KPI Jawa Timur untuk membuat perempuan sadar dan berpartisipasi dengan cara-cara seperti *workshop* caleg, ToT pemantau dan pemilih yang merupakan agenda dalam menguatkan kapasitas perempuan dalam berpolitik tersirat bahwa proses komunikasi yang baik, penyampaian informasi, data, fakta pada program pembelajaran yang baik dari narasumber kepada peserta akan mendukung ketercapaian apa yang diharapkan KPI pusat maupun wilayah agar perempuan sadar dan berpartisipasi dengan pengetahuan demokrasi yang bergairah terhadap pemikiran setara dan egaliter.

Komunikasi yang baik secara antarpersonal yang dihadirkan pada kelas politik KPI Jawa Timur dalam proses literasi akan membantu menghadirkan data dan fakta demokrasi dan masalah riil perempuan. Mengembalikan sistem demokrasi yang lebih bermakna jika perempuan hadir dalam parlemen atau menjadi pemilih yang bertanggung jawab, cerdas tidak mudah diintervensi.

Kedua, emansipasi adalah suatu keadaan ketika intersubjektivitas komunikasi saling bertemu dan melaksanakan refleksi-refleksi untuk mengambil pertimbangan. Apabila para partisan komunikasi telah dipertemukan maka pihak-pihak saling berkomunikasi menyampaikan aspirasinya, yang artinya mereka telah berdaya dan merdeka menyampaikan pendapat serta harapan-harapan yang diinginkan. Kondisi inilah yang disebut emansipatoris yang merupakan tujuan dari komunikasi.

Berdasarkan data yang terhimpun dari hasil wawancara dan observasi terhadap KPI Jawa Timur lokus LSM ini tidak hanya membuat perempuan hanya sekedar tahu tetapi juga berdaya, ingin dan mengambil langkah untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Seperti keterwakilan perempuan dalam ranah politik adalah standar bagi sebuah negara yang mengaku demokratis maka perempuannya harus berdaya. Proses yang mengarahkan pada emansipasi terlihat pada kegiatan *workshop* caleg, terdapat kegiatan kelas menganalisis peraturan yang berpihak pada anak dan perempuan, berdiskusi untuk mampu mengambil pertimbangan dan hadir menjadi bagian dan memperjuangkan ideologi demokrasi yang setara dan egaliter.

Ketiga, refleksi diri merupakan tahapan yang dilalui setelah antarsubjek komunikasi dipertemukan, maka akan mengambil pertimbangan untuk membangun *mutual-integrity*. Apabila sudah sampai pada tahap emansipatoris maka partisan komunikasi akan saling merefleksikan diri terhadap pengetahuan dan keadaan sosial yang nyata. Tahap refleksi adalah *insight* yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran. Proses ini akan

membawa individu menghadirkan kembali pengalamannya, mengelola emosi dan perasaan, mengevaluasi pengalaman, menyadari kekeliruan dan akan memperbaiki pada masa yang akan datang.

Kegiatan refleksi dalam mencapai arah atau tindakan literatif yang diperuntukkan untuk menanggapi pengalaman perempuan dan menyadari kekeliruan apa yang terjadi sehingga wacana 30% kebijakan afirmasi yang harus berpihak dan membawa isu perempuan kemudian tidak terlalu bermakna karena praktik-praktik oligarki dalam sistem politik dan pelabelan gender jika perempuan berada dalam politik. Perempuan yang sadar akan lebih mudah terarah untuk terjun kedalam ranah politik praktis seperti yang di harapkan oleh KPI Jawa Timur yang semata-mata bukan untuk mengisi kuota 30% atau formalitas untuk mengisi standarisasi negara yang disebut demokratis, tetapi lebih dari itu caleg atau perempuan dalam parlemen dapat mengangkat visi untuk isu perempuan. Masih banyak masalah perempuan di luar parlemen yang menimpa perempuan yang harus diperhatikan terutama pada penegakan hukumnya bagi perempuan. Seperti perbedaan upah pekerja laki-laki dan perempuan, masalah hukum dan perlindungan sosial yang cenderung “*victim blaming*”.

Keempat, tindakan rasional merupakan hasil yang didapat berdasarkan kesepakatan antarsubjek komunikasi yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan etis yang tidak saling mendominasi. Berdasarkan data yang di himpun terhadap organisasi KPI mengarahkan dan bertujuan agar perempuan itu mau menjadi bagian dan terlibat aktif dalam sistem politik agar tidak terjadi lagi depolitisasi. Selain agenda penyadaran dan pengawalan, muara dari hal itu semua bertujuan agar perempuan berpartisipasi dalam politik atau berlaku partisipatoris sehingga literasi politik yang baik akan tercapai. Perempuan tidak hanya tahu, tetapi mampu untuk menjadi bagian dalam sistem politik di Indonesia terutama di Jawa Timur. Menurut surat terbuka Koalisi perempuan Indonesia sejak 2009, kerja keras pemberdayaan politik telah menyumbang kader-kader perempuan yang mempunyai partisipasi dalam berpolitik diantaranya: 1) Komisioner KPU dan BAWASLU, 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota dari kubu calon presiden nomor 01 maupun 02 sebanyak 210 perempuan, 3) Tim pemantau pemilu yang dikelola organisasi sebanyak 1250 perempuan, 4) Ribuan anggota Koalisi perempuan Indonesia yang berada di 200 Kabupaten/Kota menjadi relawan demokrasi.

Pihak partisan komunikasi dalam penelitian ini adalah kelompok perempuan dari wakil perempuan dan konstituen di bawah naungan organisasi perempuan KPI

Jawa Timur dan dari kelompok kepentingan perempuan yang berbeda demi menjamin hak mereka. Sedangkan penerimanya ditujukan kepada khalayak umum yang masih terbelenggu ideologi patriarki dalam bidang politik, seperti kelompok perempuan sendiri atau kelompok laki-laki dari semua struktur kemasyarakatan. Melalui pemberdayaan secara partisipatoris untuk mendorong kelompok perempuan yang diberi edukasi yang komunikatif dengan cara ToT pemilih dan pemantau. Subjek juga harus andil sebagai peserta ToT yang memberi pemahaman dan mengidentifikasi langsung pengalaman selama berada dalam kondisi lapangan menyoal posisi dan kekuatan perempuan dalam arena politik. Pada pemilu 2019 yang telah berjalan menjadi awal untuk melihat dan menyeimbangkan analisis bahwa memang benar keberadaan perempuan untuk menjadi pengawas bisa menurunkan angka kecurangan yang melibatkan pemilih perempuan dan mengawal pemilu lebih bertanggung jawab.

Kegiatan yang bisa dilakukan adalah mengawal pemilih perempuan, memeriksa DPT perbaikan, menjadi fasilitator ketika peserta bingung. Dalam mewujudkan program tersebut tentu bersinergi dengan KPU/BAWASLU sebelumnya dimana KPI mengadakan Audiensi. Tiap TPS terdapat beberapa pengawas dari KPI bekerja sama dengan BAWASLU menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara baik. Lokalatih atau workshop caleg dan seminar diakar rumput menjadikan perempuan aktif untuk mengambil bagian perannya masing-masing untuk menumpas ketidakadilan dalam politik perempuan. Sehingga arah atau orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi politik untuk mendorong penguatan perempuan dalam berpolitik adalah partisipatif, demokratisasi dan gender egaliter melalui kegiatan pendidikan dan pengawalan penuh komunikasi dan penyadaran agar perempuan bukan hanya dijadikan standar demokrasi tetapi berkompeten mengawal demokrasi yang bergairah setara dan egaliter.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa orientasi KPI Jawa Timur melakukan literasi memiliki tiga arah kecenderungan. *Pertama*, orientasi terhadap politik praktis atau partisipasi perempuan di berbagai sektor politik baik sebagai wakil atau konstituen yang melekat terhadap politik. *Kedua*, mencapai demokratisasi demi mengembalikan hak warga negara sesungguhnya yang tidak dibelenggu depolitisasi dan oligarki dalam tubuh partai untuk kaderisasi perempuan. *Ketiga*, orientasi terhadap

penumbuhan gender egalitarian bagi wakil yang akan menjadi wakil perempuan demi representatif kebijakan yang lebih berkeadilan bagi kelompok marjinal khususnya perempuan. Melalui jalan pendidikan dan pengawalan politik, dengan demikian akan memperkuat posisi perempuan dalam politik. Arah tersebut relevan dengan teori tindakan komunikatif, proses komunikasi dalam pembelajaran politik disertai refleksi diri dan pemberdayaan langsung akan memunculkan tindakan rasional kearah partisipatif, demokratis, dan gender egalitarian.

https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/analisis-perolehan-suara-dalam-pemilu-2014-oligarki-politik-dibalik-keterpilihan-caleg-perempuan.html(akses 08 November 2018:13.45wib)

Saran

Pendidikan politik oleh KPI Jawa Timur harus lebih responsif dan konsisten, melaksanakan literasi sekaligus pemberdayaan untuk melahirkan keaktifan perempuan dalam berpolitik baik sebagai legislatif dan pemilih. Kepada generasi millennial atau kelompok kepentingan perempuan pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk lebih ditingkatkan lagi volume dalam literasi politik dan pencetakan kader, karena 40% komposisi penduduk Indonesia adalah millennialis. Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan jalan pendidikan politik terhadap generasi muda yang lebih mudah ditempa untuk mewarnai politik yang lebih bekesetaraan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, Faisal Andi, 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi demokrasi*. Jakarta: Diandra Paramita.
- Chazienul Ulum, 2011. *Perilaku organisasi*. Malang: UB press.
- MaCarty Thomas, 2012. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Mulia Dkk, 2005. *Politik dan Perempuan*. Jakarta: Gramedia
- Purwanti Ani, 2015. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Jawa timur: *Jurnal masalah hukum Volume 2 No 4*
- Ridwan Asep, 2008. Memahami perilaku pemilih pada pemilu 2004 di Indonesia: *Jurnal Demokrasi Vol. 4- No. 1*.
- Soetjipto A, Widya, 2011. *Politik Harapan Perjalanan Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan, S. Sarlito, 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.